

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya keberkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menumbuhkan landasan yang kuat bagi negara agar terciptanya masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera sesuai berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dapat juga dikatakan bahwa pembangunan ekonomi sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus secara bersama-sama dan berkesinambungan guna untuk mewujudkan negara menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata yang dapat dilaksanakan dengan cara pemerataan pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan dari berbagai perspektif antara lain ketimpangan sosial, sikap masyarakat, struktur sosial, dan juga perluasan lapangan kerja. Wijaya dkk (2014), menjelaskan bahwa pembangunan dapat dilakukan tidak hanya terpaku di kota-kota besar saja, namun juga di provinsi/daerah, kabupaten, kecamatan ataupun desa. Pembangunan di wilayah daerah yang lebih kecil dapat mendukung pembangunan pada tingkat yang lebih besar.

Dengan adanya pembangunan ekonomi dapat mempercepat terselenggaranya kegiatan ekonomi dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena melalui pembangunan ekonomi dapat memungkinkan terciptanya lapangan kerja. Pembangunan ekonomi sendiri pun tidak hanya

serta merta mengenai pertumbuhan tetapi juga dengan diikuti oleh adanya perubahan. Salah satu yang dapat digunakan untuk mengukur indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan cara melihat laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai di wilayah tersebut. Apabila pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tinggi serta dibarengi dengan semakin tinggi tingkat pendapatan perkapitanya, maka dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonominya.

Pada proses pelaksanaan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting sebab dapat menyerap tenaga kerja yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan produksi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori produksi yang dikemukakan oleh Cobb Douglas (Hotchkiss dan Kaufman, 2000), keseluruhan produksi bersumber dari adanya modal, teknologi, dan input tenaga kerja yang meningkat. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dapat berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang nantinya dapat mendorong meningkatnya input penyerapan tenaga kerja yang dapat membuat terciptanya kesejahteraan pada pembangunan ekonomi.

Penyerapan tenaga kerja diartikan sebagai pencari kerja yang telah diterima melaksanakan tugas sesuai dengan profesi yang telah diperoleh ataupun sebagai pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tenaga kerja diartikan

sebagai seseorang yang dapat melaksanakan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang guna untuk kebutuhan pribadi maupun masyarakat.

Angkatan kerja bisa disebut dengan tenaga kerja apabila menerima penyerapan tenaga kerja. Pada hal ini dapat terjadi ketika ada keseimbangan antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan keahlian yang telah dimiliki para angkatan kerja tersebut, diharapkan mampu menembus pasar tenaga kerja.

Negara yang memiliki kesejahteraan dapat dilihat dari seberapa jauh pemerintah yang berhasil menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Dengan terciptanya banyak lapangan pekerjaan, maka bisa berpengaruh terhadap meningkatnya daya beli masyarakat dan pertumbuhan pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 1997). Daerah-daerah di Indonesia termasuk DKI Jakarta tentu mempunyai masalah utama yakni permintaan tenaga kerja yang terus meningkat, namun lapangan kerja yang tersedia masih sedikit.

Perekonomian yang berkembang tumbuh begitu pesat tidak menjamin suatu daerah dapat dianggap sejahtera, kecuali jika diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja untuk menampung tenaga kerja baru. Masalah besar dibidang ketenagakerjaan yang sering terjadi adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan meningkatnya angka jumlah penduduk angkatan kerja yang terus bertambah.

Penduduk mempunyai peran penting dalam mendorong peningkatan pembangunan ekonomi disuatu daerah. Bertambahnya jumlah penduduk yang

cepat dapat mengakibatkan ledakan penduduk yang tak terkendali. Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tingginya angka tingkat kelahiran hingga bertambahnya jumlah migrasi.

Pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai pertumbuhan angkatan kerja, sehingga pertumbuhan angkatan kerja harus dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan suatu hal yang bisa terjadi apabila tidak adanya keseimbangan antara kedua hal tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta didapat angka jumlah angkatan kerja sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di DKI Jakarta

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)
2017	5.461.868
2018	5.482.175
2019	5.471.467
2020	5.470.406
2021	5.365.774

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 diatas bahwa jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta selama tahun 2017 sampai 2021 cenderung mengalami fluktuasi. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2018 hingga mencapai 5,48 juta jiwa ditahun tersebut.

Perluasan penyerapan tenaga kerja harus lebih ditingkatkan agar dapat mengimbangi lajunya pertumbuhan penduduk pada usia muda yang memasuki pasar tenaga kerja. Tidak seimbangny antara angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran.

Dalam hal ini, peningkatan pengangguran dapat menyebabkan seseorang yang tidak mempunyai pendapatan dan mereka akan terdorong jatuh pada jurung kemiskinan, serta lebih parahnya lagi dalam jangka panjang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi. Berikut merupakan tingkat angka pengangguran di DKI Jakarta pada tahun 2017 sampai tahun 2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1.1

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta

Pada gambar 1.1 diatas menunjukkan persentase tingkat pengangguran terbuka angkatan kerja di DKI Jakarta mulai tahun 2017 sampai pada tahun 2021. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwasannya tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Akan tetapi, pengangguran kembali meningkat mulai tahun 2020. Bank Indonesia melaporkan peningkatan pengangguran disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang dibarengi dengan berkurangnya penyerapan tenaga kerja di beberapa industri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja juga dapat mempengaruhi pengangguran di DKI Jakarta. Dengan

demikian, pertumbuhan angkatan kerja harus dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja menjadi masalah penting dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan pada pembangunan ekonomi bisa dilihat dari pertumbuhan produk domestik regional bruto, perbedaan ketimpangan pendapatan, berkurangnya tingkat kemiskinan, dan juga tersedianya lapangan pekerjaan. Pengembangan sektoral di DKI Jakarta lebih efektif diarahkan disektor perdagangan (BPS, 2022). Hal ini dikarenakan sektor tersebut menjadi penggerak utama pada perekonomian daerah, karena memiliki potensi yang besar untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan atau pengangguran, ketersediaan permintaan domestik. Hal tersebut telah terbukti dengan tingginya tingkat distribusi PDRB yang dihasilkan dari perdagangan besar dan eceran beserta reparasi mobil dan sepeda motor di DKI Jakarta.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2022), DKI Jakarta secara umum merupakan salah satu provinsi dengan penyumbang PDRB tertinggi pada tahun 2021, yaitu Rp1.856.301,00 juta (Tabel 1.2). Hanya pada sektor primerlah yang memberi sumbangan kecil dari PDB negara, namun pada sektor tersier dan sekunder yang memberi sumbangan lebih dari 20 hingga 70 persen dari PDB negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa khususnya disektor primer bukanlah andalan kegiatan perekonomian DKI Jakarta.

Tabel 1.2
Distribusi PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pulau dan
Sebagian Provinsi (Miliar Rupiah)

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	Rata- Rata
Pulau Sumatera	2.132.579	2.229.071	2.330.515	2.302.597	2.375.799	2.274.112
Sumatera Utara	487.531	512.763	539.514	533.746	547.625	524.235
Riau	470.984	482.065	495.607	489.984	506.458	489.019
Sumatera Selatan	281.571	298.484	315.465	315.129	326.408	307.411
Pulau Jawa	5.857.508	6.191.172	6.592.718	6.365.340	6.598.530	6.321.053
DKI Jakarta	1.635.359	1.735.208	1.836.240	1.792.403	1.856.301	1.771.102
Jawa Barat	1.343.662	1.419.624	1.490.960	1.453.380	1.507.746	1.443.074
Jawa Tengah	893.750	941.091	991.517	965.225	997.317	957.780
DI Yogyakarta	92.300	98.024	104.485	101.683	107.309	100,760
Jawa Timur	1.482.300	1.563.442	1.649.896	1.611.507	1.669.117	1.595.252
Banten	410.137	433.783	456.620	441.138	460.740	440.483
Pulau Bali dan Nusa Tenggara	302.267	310.351	325.955	309.620	309.846	311.607
Bali	144.933	154.073	162.693	147.521	143.870	150.618
Pulau Kalimantan	842.972	875.369	918.817	897.835	926.335	892.256
Kalimantan Timur	452.742	464.964	486.523	472.554	484.297	472.216
Pulau Sulawesi	603.147	675.105	702.778	704.360	744.305	685.939
Sulawesi Selatan	288.814	309.156	330.506	328.154	343.403	320.006
Pulau Maluku dan Papua	256.751	274.669	254.287	258.177	284.216	265.620
Papua	148.818	159.712	134.566	137.787	158.611	147.898

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2022*

Distribusi PDRB DKI Jakarta menurut Tabel diatas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar Rp1.771.202,00 miliar. Besarnya PDRB di DKI Jakarta terjadi peningkatan dari tahun ke tahunnya, yang mulanya dari 2017 sebesar Rp1.635.359,00 miliar yang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.792.403,00 miliar. Apabila dibanding dengan besarnya distribusi PDRB di provinsi-provinsi Indonesia, DKI Jakarta lebih dominan karena hanya terdapat satu provinsi yang besar PDRB nya hampir mendekati PDRB DKI Jakarta yaitu di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pulau yang merupakan

lokasi Provinsi DKI Jakarta juga penyumbang utama PDB negara hingga rata-rata sebesar Rp6.321.053,00 miliar dari tahun 2017 sampai 2021.

Dibanding dengan Pulau di Sumatera yang terdapat 10 provinsi hanya menyumbang rata-rata sebesar Rp2.274.112,00 miliar dengan Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai distribusi tinggi rata-rata hanya sebesar Rp524.235,00 miliar. Apalagi dibanding dengan pulau lain (yang terdapat beberapa provinsi disetiap pulaunya) hanya menyumbang tidak lebih dari 10 persen dari PDB negara. Maka dari itu, dapat dikatakan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa terkhusus di DKI Jakarta menjadi faktor utama pertumbuhan perekonomian negara.

DKI Jakarta yang menjadi kontributor PDRB tertinggi di Indonesia namun saja pada realitanya masih mempunyai permasalahan pada ketenagakerjaan. Masih banyaknya masyarakat tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pekerjaan, padahal pemerintah telah menjamin pada setiap warga agar dapat memperoleh pekerjaan dan mendapatkan hidup yang layak, sebab pemerintah yang harus bertanggung jawab menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya yang nantinya agar angkatan kerja yang tersedia dapat terserap.

Keynes berfokus pada permintaan yang efektif guna untuk solusi penciptaan lapangan kerja. Dengan merangsang permintaan melalui peningkatan konsumsi sehingga pasar meresponnya dengan cara memproduksi

barang lebih banyak. Peningkatan pada produksi tersebut dibarengi dengan peningkatan permintaan faktor-faktor produksi yakni modal serta tenaga kerja.

Kapasitas fiskal yang besar dapat mendorong pertambahan permintaan yang efektif bagi pemerintah. Peningkatan belanja modal, terkhusus untuk pekerjaan umum mempunyai beberapa manfaat. Pertama, pemerintah dapat memperkerjakan masyarakat dan dengan demikian secara langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kedua, pekerjaan umum dapat memberikan *multiplier effect* sesuai berdasarkan kecenderungan marginal akan konsumsi. (Subiantoro dan Priyono, 2017).

Misalnya, dalam hal pengerjaan pembangunan infrastruktur pemerintah mempekerjakan para pekerja konstruksi untuk dapat membangun jembatan sebesar 300 juta. Para pekerja konstruksi yang pada mulanya sekarang telah memiliki penghasilan dan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur tersebut masuk 300 juta kedalam perekonomian. Sebagai contoh, kecenderungan konsumsi marginal masyarakat sebesar 80, pekerja konstruksi tersebut menggunakan 80 persen dari penghasilannya digunakan untuk konsumsi, yang kemudian meningkatkan pendapatan dan lapangan pekerjaan untuk sektor lain. Pada proses ini masuklah lagi sebesar 240 juta dalam perekonomian. Proses ini berlangsung terus menerus serta bersifat kumulatif, sehingga peningkatan yang kecil sekalipun dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan melalui tren konsumsi (Jhingan, 2016).

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Modal Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Miliar Rupiah)
2017	11.045.723
2018	14.118.608
2019	11.511.937
2020	18.041.255
2021	22.876.612

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2022*

Dari Tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal pemerintah DKI Jakarta cenderung mengalami fluktuasi. Belanja modal ditahun 2019 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan sebelumnya tahun 2018. Namun, ditahun 2020 dan 2021 kembali mengalami peningkatan.

Belanja modal di Provinsi DKI Jakarta yang didistribusikan untuk pembangunan pada sektor publik bertujuan untuk dapat menyerap tenaga kerja. Hal tersebut didasarkan pada peran pemerintah sebagai pemasok barang yang tidak terdapat disektor swasta serta berupaya memastikan supaya alokasi sumber ekonomi dilakukan secara efisien. Dalam hal ini, pemerintah DKI Jakarta berperan sebagai *agent* distribusi pendapatan serta *agent* stabilisasi perekonomian untuk mengatasi permasalahan pada tenaga kerja, terutama pada kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibat dari banyaknya tenaga kerja yang belum terserap maka dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian.

Dalam modelnya Keynes juga menganggap tabungan jika tidak diinvestasikan sebagai faktor kunci penyebab ketidakstabilan perekonomian.

Bila tabungan tidak diinvestasikan, maka akan terjadi penurunan pengeluaran efektif. Selain hal itu, apabila tabungan hanya disimpan saja dan dibiarkan maka akan mengakibatkan investasi serta output nasional akan merosot secara tajam. Dalam Al-Quran juga telah menjelaskan hal tersebut yang tertuang dalam surah Al-Hashr (59) pada ayat ke tujuh, sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan: “Apa saja (harta yang didapat tidak dengan peperangan) yang diberikan Allah SWT kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah SWT, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang miskin, serta orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar diantara orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang telah dilarang untukmu tinggalkanlah. Dan Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-nya.

Berdasarkan ayat diatas, menekankan bahwa terdapatnya distribusi pendapatan yang adil pada beberapa golongan. Pada distribusi tersebut dilakukan supaya harta kekayaannya tak hanya mengalir dikalangan orang kaya saja. Menginvestasikan tabungan merupakan suatu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang yang mampu kepada orang kain yang lebih membutuhkan. Dengan kegiatan investasi, maka dapat terciptalah kegiatan

ekonomi baru yang nantinya dapat membuka lapangan kerja, sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan dari kegiatan ekonomi tersebut.

Keynes mengemukakan bahwa konsep multiplier berlaku tidak hanya untuk belanja modal pemerintah saja tetapi juga untuk investasi swasta. Investasi yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah investasi keuangan berbentuk portofolio, akan tetapi investasi langsung atau investasi pada sektor-sektor produktif yang dapat menghasilkan suatu barang dan jasa. Investasi langsung tersebut dapat membuka perusahaan bisnis baru dan dengan demikian akan kesempatan kerja meningkat. Meningkatnya pendapatan tenaga kerja yang baru bekerja, dapat mendorong permintaan baru untuk barang konsumsi yang pada akhirnya akan menambah kapasitas produksi serta kesempatan kerja disektor lain (Jhingan, 2016).

Investasi Penanaman Modal Asing adalah arus modal dari luar negeri yang masuk ke sebuah negara, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun juga berpatungan bersama penanaman modal dalam negeri. Investasi tersebut digunakan sebuah bisnis/usaha yang terbuka untuk investasi serta memiliki tujuan agar mendapatkan keuntungan. Selain itu, investasi asing juga salah satu kekuatan pendorong ekonomi yang penting. Sebab penanaman modal asing dapat mempengaruhi meningkatnya jumlah produksi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Perkembangan investasi sangat tergantung pada baik atau tidaknya kondisi investasi disebuah daerah. Adanya infrastruktur yang mendukung, mudahnya perizinan serta pajak yang tergolong rendah, maka investor akan terdorong untuk menanamkan modal (Adisasmita, 2005). Sebagai provinsi yang besar dan juga ibu kota negara, DKI Jakarta tentu mempunyai infrastruktur yang sangat memadai, pasar yang begitu besar dan juga banyak peluang lainnya. Tidak heran apabila DKI Jakarta memiliki iklim investasi yang paling menguntungkan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

Tabel 1.4

Investasi Penanaman Modal Asing di Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Penanaman Modal Asing (Ribu/US\$)
2017	45.955.893
2018	48.577.307
2019	41.236.016
2020	36.134.207
2021	33.306.068

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2022*

Dari Tabel 1.4 diatas realisasi investasi penanaman modal asing mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, realisasi investasi PMA di DKI Jakarta angka tertinggi yakni sebesar 48.577.307 US\$. Sedangkan ditahun berikutnya realisasi investasi PMA terus menurun hingga ditahun 2021 hanya sebesar 33.306.068 US\$ saja. Menurunnya investasi asing tersebut disebabkan oleh resesi ekonomi global pandemi virus corona, sehingga investor yang sebelumnya berencana berinvestasi untuk menanamkan modalnya lebih memilih untuk menunggunya.

Dengan demikian, diperlukan kebijakan pemerintah dalam penciptaan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kegiatan investasi. Selain itu, diperlukan juga strategi penciptaan investasi pada sektor industri yang bersifat padat karya agar dapat menyerap tenaga kerja. Untuk itu sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja menjadi sangat penting dalam hal membantu peningkatan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, terdapat faktor-faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta antara lain yaitu jumlah angkatan kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal, dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh faktor-faktor makroekonomi tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta pada tahun 1990-2021. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Komang Pande Wiasih dan Ni Luh Karmini (2021) menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan semakin meningkat jumlah angkatan kerja maka juga akan meningkat pula tenaga kerja yang terserap.

Penelitian juga dilakukan oleh Bagas Martimbang (2017) menyimpulkan bahwa variabel PDRB secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara itu variabel belanja modal berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan atau bersama-sama variabel PDRB dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Leo

Budiriansyah dkk (2019) menyatakan bahwa variabel investasi penanaman modal asing memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dari paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta diantaranya adalah jumlah angkatan kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal, dan penanaman modal asing. Oleh sebab itu, hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, dan Investasi Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta.”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Tingginya permintaan akan tenaga kerja merupakan faktor pendukung pembangunan negara. Provinsi DKI Jakarta yang merupakan provinsi terbesar apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya, namun sebagai kota besar di Indonesia DKI Jakarta nyatanya masih belum dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. Terserapnya tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta diukur dari *employment rate* telah mempunyai perbandingan yang cukup baik dimana tingkat pertumbuhannya telah lebih dari 90% kurun waktu lima tahun terakhir, akan tetapi yang masih menjadi permasalahan disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta?
4. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian dalam menganalisis pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, dan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi DKI Jakarta yaitu memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah jumlah angkatan kerja berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah belanja modal berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah investasi Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dibawah ini adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dapat berkontribusi pada dunia keilmuan, khususnya dalam penelitian perencanaan dan pembangunan.
2. Sebagai informasi baru untuk pemerintah pusat sehingga menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun kebijakan agar nantinya kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
3. Dapat menjadi bahan referensi maupun pembandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.